

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik⁹. Diberikan oleh *Thomas R. Dye* dalam yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya *Crinson* juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang

⁹ Ayuningtyas, Dumiliah Konsep Kebijakan : Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2014 halaman 8

dimaksud¹⁰. Mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.¹¹

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn) sebagai berikut.

a. Isi kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons

¹⁰ Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta 2017 halaman 166

¹¹ Ibid halaman 17

berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

b. Aktor atau pemangku

kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*) Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

c. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

2.2. Implementasi Kebijakan

Mendefinisikan Implementasi Kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.¹² Pernyataan diatas menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah tindakan yang baik dilakukan

¹²Agustino, Leo *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetak Kedua Alfabeta, Bandung 2008. Hal 30

oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta demi agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Jelas bahwa implementasi merupakan proses pencapaian sebuah tujuan.

Implementasi Kebijakan secara ontologi, subjectmatter studi implementasi dimaksudkan memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal di implementasikan di suatu lokasi/ daerah tertentu. Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudnya untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelasan) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi, apa sebenarnya faktor- faktor yang mempengaruhi atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan.¹³

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan *Van Meter* dan *Horn* dalam *Grindle* bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

¹³Tresiana N & Noverman Duadij *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Suluh Media 2021, Hal 50.

Mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Menurut *Van Meter dan Van Horn* dalam menguraikan proses bagaimana keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu program atau kebijakan yakni: komunikasi, sumber daya, karakteristik, standar dan tujuan kebijakan dan sikap para pelaksana

1. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang berkualitas selalu dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Manusia menjadi sumber daya paling

penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebab keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Selain itu, sumber daya finansial juga termasuk penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dana dan intensif yang kurang atau terbatas dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

2. Standar dan tujuan kebijakan

Tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat dilihat dari ukuran dan tujuan suatu kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan sasaran terlalu ideal (*utopis*), kebijakan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Untuk menilai kinerja implementasi suatu kebijakan, digunakan standar dan target sasaran yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Kinerja agen pelaksana sebagai organisasi atau kelompok yang ikut serta dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi penting dalam menyukseskan jalannya implementasi kebijakan melalui karakteristik yang dimiliki setiap organisasi pelaksana. Kebijakan yang dilakukan sering kali menuntut para pelaksana kebijakan untuk disiplin dan ketat. Selain itu, organisasi pelaksana yang persuasif dan demokratis juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Penentuan agen pelaksana atau organisasi pelaksana

kebijakan dipertimbangkan pada seberapa besar wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan suatu kebijakan.

4. Sikap para pelaksana

Berhasilnya implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan. Sikap yang dimaksud ialah apakah para pelaksana menolak kebijakan atau menerima dan mendukung sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan formulasi kebijakan tidak mengikutsertakan masyarakat setempat yang biasanya lebih mengetahui persoalan dan permasalahan yang dirasakan. Namun, suatu kebijakan bisa bersifat top down dimana para pengambil keputusan tidak mengenal atau tidak mengetahui keinginan, kebutuhan, atau permasalahan apa yang harus ditangani.

5. Komunikasi antar organisasi pelaksana

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn, para implementor harus dapat memahami standar dan tujuan dari kebijakan tersebut. Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik antar organisasi pelaksana karena pencapaian dari standar dan tujuan dalam implementasi suatu kebijakan merupakan tanggung jawab. Dalam penyampaiannya, informasi yang diberikan kepada atau oleh para pelaksana kebijakan harus sama dan konsisten.

2.2.1 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Mengefektikan kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan tahap- tahapan implementasi kebijakan ditinjau dari¹⁴:

¹⁴Wahab Solichim Abdul, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014 halaman 5

a. Keluaran Kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b. Kepatuhan

Kelompok Sasaran Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dan para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Dampak Nyata

Kebijakan Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan Undang-undang. Kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebabakibat) yang tinggi.

d. Persepsi Terhadap Dampak

Penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

2.2.2. Unsur-Unsur Proses Implementasi Kebijakan

Perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis bisa dibedakan. Maka dari itu bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni:

1. Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapantahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadikenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
2. Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau “outcomes”, karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni:
 - a. Adanya program/kebijakan.
 - b. Target Groups.
 - c. Unsur pelaksana/implementor.
4. Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.

2.3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut kementrian sosial menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulanya melalui mekanisme melalui bank. Yang untuk mengambil uang yang bekerja sama dengan bank. Tujuan program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Program Keluarga Harapan (PKH) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari prgorm beras sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintahan sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang disalurkan secara non tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Program Keluarga Harapan (PKH) setiap 3 bulan sekali yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di agen yang telah bekerja sama dengan bank. Efektivitas program Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut.¹⁵

1. Tepat sasaran dalam melakukan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai BPNT, harus diberikan kepada PKH sesuai dengan data yang ada sehingga mengurangi kesalahan dalam melaksanakan program.

¹⁵ Benny Rachman, Adang Agustian, Bantuan Non-Tunai (BPNT) 2019. hal 8

2. Tepat jumlah upaya dalam menyalurkan bantuan sosial, diperlukan kesesuaian jumlah yang telah ditentukan dengan pelaksanaan dilapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
3. Tepat waktu adalah upaya dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos dapat berjalan secara efektif.
4. Tepat kualitas adalah upaya dalam mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bahan pangan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik.

Upaya meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Kebijakan program bantuan langsung tunai (BPNT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintahan Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan.¹⁶

Alur Prrogram Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut

1. Penataan awal oleh pemerintah daerah

- Pemerintah daerah melalui RT/RW,Desa/Kelurahan hingga dinas sosial melakukan pendataan warga yang Memenuhi kreteria penerima Baksos.
- Data yang dikumpulkan akan mencakup nama, Nomor induk kependudukan (NIK) Kondisi sosial ekonomi dan informasi keluarga.

¹⁶ Trino Ikhsan,dkk, *Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (bpnt) dengan Kesehteran Masyarakat miskin*, Jurnal Fisip Unsyiah, vol.4, No 2, hal 9 2019.

- Pendataan dilakukan dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial(DTKS) Yang dikelola oleh kementerian sosial(kemensos)

2. Verifikasi dan validasi data

- Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diverifikasi oleh petugas sosial untuk memastikan bahwa calon penerima Bansos mulai syarat yang telah ditentukan.
- Jika terdapat ketidak sesuaian atau perubahan data masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa atau dinas sosial setempat.

3. Penetapan daftar penerima oleh kementerian sosial

- Setelah proses validasi selesai data penerima Bansos dikirim ke kementerian sosial untuk verifikasi lebih lanjut dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- Keputusan akhir mengenai daftar penerima Bansos ditetapkan mulai surat keputusan SK oleh Kemensos

Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut : mengurangi beban pengeluaran PKH melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan

- a) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada PKH
- b) Meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi PKH Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada PKH dalam memenuhi kebutuhan pangan

c) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat PKH sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b) Meningkatkan transaksi akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan.
- c) Meningkatkan efesinesi penyaluran bantuan sosial meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usah mikro dan kecil dibidang perdagangan.

Besar Bantuan Pangan Non Tunai adalah 500.000/PKH/ 3 bulan bantuan tersebut tidak dapat diambil dengan beres dan gula dapat ditukar dengan uang. Penerima bantuan pangan merupakan jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan non tunai disetiap desa. Bantuan pangan non tunai untuk setiap desa ditetapkan oleh menteri sosial pada waktu penetapan. Raskin /Rastra telah bertransformasi menjadi program bantuan sosial pangan (bansos pangan) yang terdiri dari bantuan sosial beres sejahtera (bansos rastra) dan bantuan non tunai (BPNT).

Kebijakan program tentunya guna pencapaian yang lebih baik dari waktu ke waktu. Adanya program bantuan pangan non tunai (BPNT) diharapkan mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran bantuan pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2.4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan (fasdik) yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, PKH dan lanjut usia dapat mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengentasan kemiskinan : membantu keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka, sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.
2. Peningkatan kesejahteraan : meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat melalui bantuan sosial yang mendukung kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

¹⁷Buku Kerja PKH tahun Penerbit Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2015, halaman 15.

3. Meningkatkan akses pada layanan sosial : memfasilitas akses keluarga miskin kelayakan kesehatan dan pendidikan termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan sekolah.
4. Penguatan investasi manusia : mendorong keluarga untuk berinvestasi dalam pendidikan anak dan kesehatan, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.
5. Peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi : membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi mereka di tengah tantangan yang ada.

TABEL 2.2
BANTUAN PANGAN NON TUNAI

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (RP)
1	Bantuan peserta pendidikan serta SD/ sederajat	RP.200.000
2	Bantuan peserta pendidikan serta SMP/ sederajat	RP.250.000
3	Bantuan peserta pendidikan serta SMA/ sederajat	RP.300.000
4	Bantuan lanjut usia keatas	RP.400.000

Sumber: Besar Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari tabel diatas dapat diketahui besaran bantuan yang diterima oleh setiap komponen berbeda-beda bantuan yang diterima oleh peserta pendidikan di tingkat SD atau sederajat adalah sebesar Rp.200.000 sedangkan bantuan peserta pendidikan di tingkat SMP atau sederajat adalah sebesar Rp.250.000 lalu bantuan untuk peserta pendidikan di tingkat SMA atau sederajat adalah Rp.300.000 dan bantuan lanjutan untuk usia ke atas adalah sebesar Rp.400.000. Bantuan tersebut diberikan dengan dibatasi maksimal 4 jiwa dalam satu keluarga penyaluran

bantuan biasanya dilakukan dengan 4 tahap dalam satu tahun yaitu di bulan maret Juni September dan juga Desember.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berfikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Mendeskripsikan penelitian ini perlu menggunakan kerangka pikir. Melalui teori yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena penelitian untuk mendeskripsikan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut alur kerangka pikir penelitian ini:

1) Sumber Daya

sumber daya mencakup SDM seperti petugas pendamping sosial, dana dari pemerintah, serta sarana seperti sistem elektronik dan e-warung (warung mitra). Sumber daya yang cukup dan tepat sangat menentukan kelancaran distribusi bantuan.

2) Standar dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Apabila standart, tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai akan terjadi multi interpretasi dan sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

3) Karakteristik organisai

Karakteristik ini memengaruhi cara kebijakan dijalankan dan menentukan strategi implementasi agar tujuan program tercapai secara efektif.

4) Sikap para pelaksana

Sikap yang positif seperti komitmen, kejujuran, kepedulian terhadap penerima manfaat, dan profesionalisme akan mendorong pelaksanaan program yang adil, tepat sasaran, dan transparan. Sebaliknya, sikap negatif seperti kurang tanggap atau tidak peduli bisa menyebabkan masalah dalam penyaluran bantuan.

5) Komunikasi antar organisasi pelaksana

Komunikasi melibatkan penyampaian informasi antara pemerintah pusat, daerah, pendamping, dan penerima manfaat. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman, memastikan informasi bantuan tersampaikan dengan benar dan tepat waktu.

Bagan 2.1
Kerangka Pikir

